

**Strategi Amerika Serikat
Dalam Menekan
Pengembangan Nuklir Iran**

Frequency of International Relations
Vol 1 (2) 314-340
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : October 22, 2019
Accepted : February 26, 2020
Available On-line : February 27, 2020

Rio Sundari

Universitas Islam Riau
riosundari@soc.uir.ac.id

Abstract

The purpose of this research “United States strategy in Suppressing Iran's Nuclear Development” as a critical analysis related to the controversy over nuclear development conducted by Iran. In the history of Iran's nuclear development, the United States is one of the countries that fully supports this nuclear development. However, the dynamics of relations between Iran and the United States are a factor in the status of the nuclear development. As a result, Iranian attitudes and policies that are not in line with the United States will result in a decline in American support for Iran’s nuclear development. Finally, in 2018 the US announced its exit from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and decided to impose economic sanctions on Iran which coincided with Iranian support for Syria which was contrary to US political attitudes. This research uses qualitative research methods using secondary data such as books, journals, articles and other sources to provide analysis of this case. This research results in a finding of efforts and strategies carried out by the United States to suppress Iran’s nuclear development. This was done because of two things, first, related to the interests of the United States in the Middle East. Iran’s political stance is often at odds with the politics of the United States. Second, reduce and maintain the hegemony of Israel as a close ally of the United States in the Middle East.

Keywords: *Iran; Unites States; Nuclear; Strategy*

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1991 berdampak pada munculnya tendensi negara-negara lain untuk memiliki senjata nuklir. Hal ini terjadi karena negara-negara telah melihat persetujuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin mampu menahan diri untuk tidak saling menyerang karena kepemilikan senjata nuklir. Berbagai alasan negara dalam keinginannya untuk memiliki senjata nuklir ini, baik karena alasan keamanan lantaran negara tetangganya telah memiliki kemampuan nuklir maupun karena keinginan memiliki nuklir untuk meningkatkan status pengaruh negara dalam perpolitikan global. Dampaknya, negara-negara berlomba untuk memiliki nuklir tersebut sehingga kemampuan nuklir nuklir bukan hanya dimiliki oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun juga berkembang di negara lain. Upaya pembangunan proyek prestisius ini bukan hanya dilakukan oleh negara yang notabene kaya secara ekonomi, namun juga dilakukan oleh negara yang termasuk dalam daftar negara dengan tingkat ekonomi negara berkembang. Seperti Pakistan yang termasuk dalam kelompok negara berkembang yang mampu mengembangkan nuklir dengan bantuan Amerika Serikat yang ketika itu bertujuan untuk memerangi terorisme di wilayah Afghanistan (Jemadu, 2008: 159).

Negara Prancis, India, Inggris, Cina, Jerman, Belgia, Pakistan, Belanda, Italia, Turki, Korea Utara, hingga Negara Israel yang

merupakan negara yang kecil dan kontroversial dalam status negaranya pun ikut dalam pengembangan senjata nuklir (Aljazeera, 2012). Deretan negara-negara ini adalah negara dengan status pengembang senjata nuklir aktif. Selain itu, negara-negara pengembang nuklir dalam status hanya berada pada level pengembangan energi (non senjata nuklir) jumlahnya juga tidak sedikit. Padahal, potensi pengembangan nuklir dari status sebagai pengembangan energi ke status senjata nuklir sangat mudah dan cepat.

Iran adalah salah satu negara yang termasuk dalam deretan negara yang mengembangkan nuklir dengan tujuan pengembangan energi. Berdasarkan sejarah, pemerintah Iran tertarik untuk memiliki dan mengembangkan program nuklirnya sudah berlangsung sejak tahun 1953. Pada masa itu Iran yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlevi mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dengan melalui perjanjian kerjasama nuklir sipil sebagai bagian dari program “*atom for peace*”. Perjanjian tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Iran dengan membangun Pusat Penelitian Nuklir di Universitas Teheran pada tahun 1959. Kemudian resmi didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh AEOI (*atomic energy organization of Iran*), di mana pemerintah Iran ketika itu mulai menjajaki kemungkinan sumber energi lain yang berbasis non-minyak. Amerika Serikat juga membantu suplai kebutuhan-kebutuhan bahan baku untuk program nuklir Iran yang dilakukan pada tahun 1967,

diantaranya adalah 5.545kg Uranium yang telah diproses, di mana 5.165 kg merupakan *fissile isotope* yang dibutuhkan sebagai bahan bakar untuk pusat penelitian. Amerika Serikat juga mensuplai 112g Plutonium, di mana 104g adalah merupakan *fissile isotope* yang dipakai sebagai sumber energi untuk pusat penelitian nuklir (Poneman, 1982: 84).

Pada 1 juli 1968, Iran menandatangani perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*) yang kemudian diratifikasi oleh Parlemen Iran pada 5 maret 1970. Sejak itu pulalah Iran mengklaim memiliki hak mutlak menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Selama masa pemerintahan Reza Pahlevi terjadi ekspansi kapabilitas dan fasilitas penelitian nuklir Iran, di mana beberapa negara lain juga terlibat dalam pengembangan nuklir Iran. Misalnya Perancis membantu Iran dalam membangun Pusat Teknologi Nuklir di Esfahan pada pertengahan 1970-an. Reaktor-reaktor di Esfahan juga disuplai oleh Cina (Payvand, 2010).

Namun perkembangan selanjutnya, setelah Iran dicurigai oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat maupun Uni Eropa telah berupaya untuk mengembangkan program nuklirnya untuk tujuan militer, maka aktivitas program nuklir Iran menjadi isu yang sangat kontroversi. Amerika Serikat yang dulu pernah mendukung program nuklir Iran, justru menjadi negara yang sangat keras menentang keberadaan nuklir Iran di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat

sangat aktif bersuara menuntut Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Melalui badan PBB dan Uni Eropa, kasus nuklir Iran mengalami “pasang-surut” dalam proses penyelesaiannya.

Kajian yang mengelaborasi terkait dinamika hubungan Iran dan Amerika Serikat sebenarnya sudah banyak dibahas dan diteliti. Namun, dari sekian banyak literatur yang ada, belum ada satupun tulisan yang khusus menganalisis dan mengelaborasi lebih spesifik mengenai strategi Amerika Serikat dalam menekan program nuklir Iran. Sebagian besar penelitian berkaitan dengan isu dan fenomena hubungan Amerika Serikat dan Iran berada di seputar pembahasan diskursus program nuklir Iran sehingga penulis memandang penting untuk menghadirkan sebuah tulisan yang mengelaborasi dan menganalisis strategi Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran tersebut sebagai informasi lengkap terkait kemunduran secara drastis pengembangan nuklir Iran. Misalnya tulisan sebuah artikel yang berjudul *Approaches toward Iran's Nuclear Programme: The United States of America and China in Comparative Perspective*, yang ditulis oleh Gawdat Bahgat, argumentasinya bahwa kebijakan dan pendekatan antara China dan Amerika Serikat dalam isu nuklir Iran sangat berbeda. Tulisan ini lebih kepada aspek pendekatan yang membandingkan sikap kedua negara dalam isu nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran yang konfrontatif, berbeda dengan China yang lebih *friendly*. Berbeda dengan argumen dan

pendekatan yang digunakan oleh Gawdat Bahgat yang lebih cenderung melihat fenomena hubungan Iran dan Amerika Serikat kepada aspek ancaman keamanan bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Bahgat berargumen bahwa ancaman Amerika Serikat di Timur Tengah setelah kelompok Taliban di Afghanistan dan Irak adalah Iran. Amerika Serikat merasa khawatir timbulnya rezim pembangkang seperti Irak dan Taliban di Afghanistan yang secara vokal menentang kebijakan Amerika Serikat (Carlisle, 2010). Apalagi Iran sebagai negara yang secara potensial, sangat mampu dan berpeluang melakukan transformasi dari program nuklir energi menjadi program nuklir senjata. Maka, sangat rasional ketika Amerika Serikat melakukan tekanan dan desakan terhadap Iran. Tulisan ini sedikit membantu penulis sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

Berbeda dengan argumen penggiat politik internasional di atas, Imad Mansour lebih melihat teknologi nuklir Iran kepada aspek keamanan regional, di mana pengembangan teknologi ini akan membangun stigma negatif dan kecurigaan dalam kawasan. Imad Mansour (2008) sebagai kandidat PhD di Jurusan ilmu politik Universitas McGill (Kanada), sekaligus pakar studi dinamika keamanan regional, lebih *concern* terhadap dinamika yang terjadi di kawasan terkait isu nuklir Iran tersebut. Di dalam tulisannya yang berjudul *Iran and Instability in the Middle East: How Preferences*

Influence the Regional Order, beliau berasumsi bahwa perilaku agresif Amerika Serikat yang menempatkan pangkalan militernya di kawasan Timur Tengah telah memicu semangat Iran dalam mengembangkan teknologi nuklirnya sebagai antisipasi potensi serangan dari Amerika Serikat. Sebaliknya, pengembangan nuklir Iran tersebut juga menjadikan keamanan regional menjadi terganggu.

Sebagai peneliti dibidang kebijakan luar negeri dan strategi, Shmuel Bar dkk dalam tulisannya yang berjudul *Iranian Nuclear Decision Making Under Ahmadinejad*, lebih fokus pada alasan Iran mengapa berambisi mengembangkan nuklir. Dalam penelitiannya Shmuel lebih melihat motivasi Iran tetap mempertahankan program nuklirnya walaupun begitu banyak negara dan organisasi menekan dan mengkritik program nuklirnya. Sikap ini dilakukan Iran karena doktrin pertahanan nasionalnya yang menuntut tetap berada pada pengembangan pertahanan yang sifatnya mampu melindungi negara Iran dari potensi serangan dari luar. Doktrin ini didasari oleh pengalaman Iran dalam perang teluk yang meluluh-lantakkan Iran. Dari peristiwa ini, Iran tidak mau lagi ada potensi serangan dari musuh regionalnya yang akan mengganggu keamanan nasionalnya sehingga nuklir sebagai teknologi muthakhir harus tetap dimiliki oleh Iran sebagai sebuah senjata modern yang paling ditakuti negara di dunia.

Fenomena ini menjadi menarik karena terlihat ada kebijakan politik ganda Amerika Serikat. Di satu sisi Amerika Serikat

membiarkan Israel mengembangkan nuklirnya hingga pada level senjata, bahkan dalam jumlah yang besar, di sisi yang lain Amerika Serikat justru melarang Iran dalam mengembangkan nuklirnya yang notabene belum sampai pada level pengembangan senjata sebagaimana dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, pengelolaan uranium untuk nuklir Iran tidak boleh sampai pada status senjata, karena ini akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama bagi Israel yang merupakan mitra terbaik dan terdekat Amerika Serikat. Dari fenomena ini, maka ada beberapa pertanyaan yang akan penulis elaborasi terkait masalah nuklir Iran ini yakni mengapa Amerika Serikat melarang pengembangan nuklir Iran dan bagaimana strategi Amerika Serikat dalam menekan pengembangan nuklir Iran tersebut?

Fenomena dalam hubungan internasional selalu dilihat dalam multi dimensi dan perspektif. Untuk memastikan dan menguatkan cara berpikir, maka penulis dalam hal ini menggunakan perspektif realis. Menurut perspektif ini, salah satu persoalan mendasar dalam interaksi sebuah Negara dalam hubungannya dengan negara lain adalah terkait keamanan (*security*). Menurut Stuart Croft keamanan adalah masalah yang menyangkut eksistensi sebuah negara dan pembahasannya banyak dibahas terutama oleh kaum neo-realis (Floyd and Croft, 2010: 3). Menurutnya, sesuatu akan menjadi sebuah masalah keamanan ketika ada aktor luar mengancam tujuan negara, terutama terhadap

survival negara. oleh karena itu menurut Croft masalah keamanan ditangani oleh negara dan agennya seperti militer. Keamanan dipersepsikan sebagai bebas dari potensi ancaman, bahaya, dan ketakutan. Suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai penting (*core values*), dengan menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, maka keamanan akan dicapai melalui kemenangan dalam suatu peperangan (Baylis and Smith, 2001: 255).

Kemudian, dalam penelitian yang terkait kapabilitas nuklir ini, penulis menggunakan konsep *deterrence*. Pada mulanya teori ini digunakan dalam upaya menjelaskan hubungan antar negara *super-power* dalam Perang Dingin yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian konsep ini digunakan untuk menilai fenomena yang lebih luas, artinya tidak hanya digunakan pada fenomena konflik antara dua negara adidaya namun juga digunakan pada konflik negara-negara selainnya. Penilaian dan penggunaan konsep ini dilihat pada hakikat konsep itu bekerja, bukan pada fakta kekuatan negara secara kuantitas militer yang dimiliki. Artinya kepemilikan senjata yang dimiliki oleh Amerika Serikat tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh Iran, namun dengan kekuatan teknologi nuklir yang dimiliki cukup memberikan kekuatan untuk menahan AS untuk tidak menyerang. Hal ini disebabkan oleh daya ledak dan kekuatan teknologi nuklir sangat ditakuti oleh seluruh negara di dunia. Ini menunjukkan adanya “daya

tahan” yang bekerja pada sebuah negara besar dalam menahan dirinya untuk berlaku agresif kepada negara-negara pemilik nuklir.

Menurut Spiegel (Sinaga, 2009: 21) terdapat beberapa yang harus dipenuhi sebuah negara agar *deterrence* bekerja, yaitu:

a. Komitmen

Sebagai langkah awal dari *deterrence*, negara harus memiliki komitmen akan “menghukum” negara yang berani melakukan serangan kepada negara yang bersangkutan. Dalam artian lain, negara yang berada dalam posisi bertahan harus dengan tegas membuat garis batasan dan memberikan peringatan kepada negara yang menantanginya bahwa jika melewati garis batasan tersebut penderitaanlah yang akan dirasakan olehnya. Dalam menekankan komitmen negara, yang dibutuhkan adalah sebuah langkah yang definitif dan spesifik. Fungsi *deterrence* akan gagal jika negara bersikap ambigu dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk “menghukum” negara yang melakukan serangan.

b. Kapabilitas

Langkah kedua adalah komitmen yang jelas pun tidak akan berarti banyak jika negara tidak punya alat untuk melaksanakannya. Karena *deterrence* adalah meyakinkan negara lain bahwa melakukan kesalahan, seperti

menyerang negara yang dalam posisi bertahan, maka negara haruslah memiliki kekuatan berupa kapabilitas untuk menyerang balik negara lawan. Bahkan jika tingkat *deterrence* terlihat lemah, negara harus terlihat meyakinkan musuhnya, bahwa ini bukanlah kekuatan keseluruhan yang dimilikinya.

c. Kredibilitas

Syarat terakhir adalah mengenai kredibilitas negara yang melakukan *deterrence*. Kredibilitas negara, masa lalu negara yang bersangkutan, dan gambaran umum mengenai negaranya membantu negara dalam melaksanakan komitmen dan membangun kapabilitas agar meyakinkan negara lain tidak melakukan agresi kepada negara yang dalam posisi bertahan. Dengan kredibilitas ini dalam pikiran negara agresor, maka *deterrence* akan berjalan baik.

Militer dan persenjataan memiliki beberapa fungsi penting untuk sebuah negara. salah satu tujuannya adalah mencegah negara lain untuk menggunakan kekuatan militer sehingga terlihat begitu berisiko bagi negara tersebut. Definisi klasik *deterrence* adalah suatu hubungan di mana negara A memberikan ancaman terhadap negara B dengan hukuman untuk meyakinkan negara B agar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh negara A. Definisi konsep ini

mengalami perkembangan, *deterrence* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai *retaliation* (hukuman) dan sebagai *denial* (pertahanan) (Buzan, 1987: 135).

Deterrence sebagai *retaliation* adalah memperlihatkan kekuatan militer negara A dan memberikan ancaman hukuman yang keras sehingga dapat mencegah negara B (dalam hal ini pihak yang dianggap mengancam) untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian dapat juga disebut sebagai ancaman balasan sebagai hukuman agar pihak lawan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman hukuman tersebut ditujukan pada populasi atau infrastruktur industri lawan. Sedangkan *deterrence* sebagai *denial* berupa kemampuan untuk menangkal secara langsung serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh terhadap negara mereka. Esensi *deterrence* adalah menciptakan ancaman militer dalam rangka mencegah aktor lain untuk melakukan tindakan agresif, mencegah hal yang tidak diinginkan sebelum hal tersebut terjadi.

Pencegahan merupakan usaha yang dilakukan satu pihak untuk membujuk agar pihak lainnya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingannya dengan cara meyakinkan lawan bahwa biaya yang ditanggung dengan mengambil tindakan itu akan lebih besar dengan asumsi lawan adalah pihak yang rasional (<http://id.scribd.com/doc/82513744/Review-DipMod-Coercive-Diplomacy>).

Secara umum, pengertian *deterrence* adalah bagaimana membuat musuh takut untuk menyerang. Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya digunakan untuk membuat negara lainnya takut untuk melakukan serangan kepada negara yang memiliki kapabilitas yang kuat. Tetapi, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki kapabilitas yang kuat untuk melakukan *deterrence*? Jawabannya bisa ditemukan lewat penangkalan nuklir (*nuclear deterrence*).

Kapabilitas erat kaitannya dengan aspek militer, dan senjata nuklir menjadi determinan utama dari kapabilitas sebuah negara. Kapabilitas negara sangatlah penting termasuk sebaik apakah kualitas persenjataan militer dan sebanyak apakah kuantitas personil militer yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

Negara kuat akan berpikir panjang dan cenderung ragu-ragu untuk menyerang negara lemah jika mereka memiliki nuklir. Memang jika sebuah negara memiliki nuklir, bahkan dari fasilitasnya saja, akan dianggap sebagai negara yang beresiko kecil akan diserang negara lain. Risiko itu akan semakin berkurang jika pemerintahan yang memiliki nuklir secara kuat termotivasi untuk menjaga negaranya. Hal ini karena negara yang akan menyerang dipaksa untuk menanggung risiko yang besar jika meremehkan *nuclear deterrence* (Buzan, 1991: 169).

Kenneth Waltz (Etzioni, 2010: 120) pernah mengatakan “*If a country has nuclear weapons, it will not be attacked militarily in ways*

that threaten its manifestly vital interests. That is 100 percent true, without exception, over a period of more than fifty years. Pretty impressive.” Dalam kasus Iran, walaupun belum ada bukti bahwa Iran memiliki senjata nuklir, namun kepemilikan fasilitas nuklir dan pengayaan uranium secara aktif dari Iran setidaknya mampu menunda ancaman secara agresif dari musuh. Hal ini karena teknologi nuklir yang fungsinya bersifat dualisme, yakni fasilitas nuklir di satu sisi bisa digunakan sebagai kepentingan damai, di sisi yang lain teknologi nuklir juga bisa digunakan sebagai kepentingan militer. Tergantung bagaimana sikap dan keinginan Iran dalam mengolah fasilitas nuklir tersebut. Wacana dualisme inilah yang memicu sebuah negara menunda atau menghentikan sikap untuk melakukan upaya serangan secara agresif, karena negara adalah aktor yang rasional di mana negara tidak akan mau mengambil risiko yang berat atas kebijakan yang dikeluarkannya. Hal ini juga telah terjadi kepada Korea Utara ketika Amerika Serikat di masa pemerintahan Bill Clinton terpaksa melakukan negosiasi terhadap fasilitas reaktor air berat yang dimiliki oleh Korea Utara dalam upaya mencegah Korea Utara dalam memiliki senjata nuklir. Artinya, Amerika Serikat tidak akan mengeluarkan kebijakan agresif ketika sebuah negara secara potensial mampu menghasilkan senjata nuklir. Pelajaran ini pulalah yang diikuti oleh Iran, karena meskipun belum memiliki senjata nuklir, akan tetapi fasilitas nuklir Iran dipandang potensial untuk menghasilkan senjata

nuklir. Keadaan inilah yang dimaksud dengan upaya *deterrence* dari Iran yang notabene sangat rentan terhadap keamanan negaranya, baik dari pihak Amerika Serikat maupun dari serangan militer dari Israel di kawasan.

Strategi didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan dengan kekuatan yang tersedia dalam lingkungan tertentu. Adapun dalam penerapannya dapat dengan menggunakan kekuatan militer untuk tujuan perang militer, menggunakan kekuatan militer dan non militer untuk tujuan perang militer. Dan dapat juga gabungan dari keduanya (*Grand Strategy*) untuk upaya pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam hal ini, Collin mengemukakan tentang beberapa pendekatan strategi, yang bertolak dari asumsi bahwa kesenjangan antara tujuan dan sarana akan menimbulkan resiko. Pertama, Sequential yaitu menempatkan setiap langkah secara bertahap sampai tujuan akhir (merongrong, mengucilkan, memotong logistik, mengacaukan garis hubungan, barulah melakukan invasi). Pendekatan ini dilakukan jika dalam hal sarana tidak cukup besar, waktu dan sasaran tidak kritis. Kedua, Komulatif: menggunakan upaya secara serentak dengan sebanyak mungkin sarana tersedia dalam tempat waktu yang terbatas. Pendekatan ini dilakukan, jika sarana cukup, waktu dan sasaran kritis.

Disamping itu juga ada pendekatan yang disampaikan Clausewitz (pendekatan strategi langsung) yang lebih menekankan pada tahap operasional, antara lain ia mengatakan bahwa untuk memperoleh

kemenangan, maka yang perlu diperhatikan sasaran pokok adalah kekuatan lawan, dan hanya dengan penghancuran militer saja kemenangan akan dicapai, dengan mematahkan semangat musuh lawan dan juga mengungguli kekuatan pokok lawan dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini, Collin mengemukakan tentang beberapa pendekatan strategi, yang bertolak dari asumsi bahwa kesenjangan antara tujuan dan sarana akan menimbulkan resiko. Pertama, Sequential yaitu menempatkan setiap langkah secara bertahap sampai tujuan akhir (merongrong, mengucilkan, memotong logistik, mengacaukan garis hubungan, barulah melakukan invasi). Pendekatan ini dilakukan jika dalam hal sarana tidak cukup besar, waktu dan sasaran tidak kritis. Kedua, Komulatif: menggunakan upaya secara serentak dengan sebanyak mungkin sarana tersedia dalam tempat waktu yang terbatas. Pendekatan ini dilakukan, jika sarana cukup, waktu dan sasaran kritis. Disamping itu juga ada pendekatan yang disampaikan Clausewitz (pendekatan strategi langsung) yang lebih menekankan pada tahap operasional, antara lain ia mengatakan bahwa untuk memperoleh kemenangan, maka yang perlu diperhatikan adalah: sasaran pokok adalah kekuatan lawan, dan hanya dengan penghancuran militer saja kemenangan akan dicapai, dengan mematahkan semangat musuh lawan dan juga mengungguli kekuatan pokok lawan dengan kekuatan yang lebih besar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, artikel, dokumen, media online dan lainnya yang berkaitan dengan data-data pendukung penelitian ini. Data yang didapat diolah sebagai upaya mengelaborasi terkait strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menekan program nuklir yang dibangun oleh Iran. Data yang didapat dari sumber-sumber tersebut yang selanjutnya di-*review* sebagai dasar dalam membangun analisis kompleks terkait masalah yang bersangkutan. Dengan metode seperti ini kekuatan argumentasi akan lebih kuat dan akurat sehingga masalah yang dielaborasi menjadi lebih mudah dipahami.

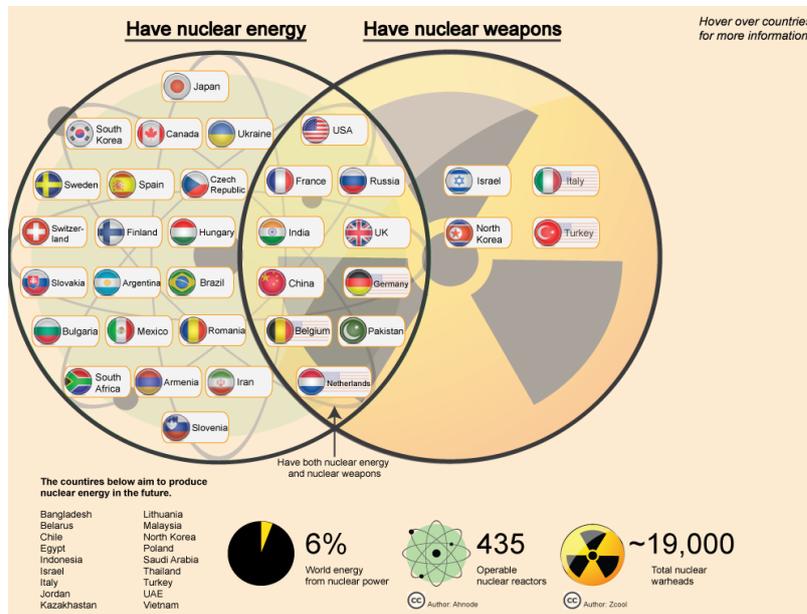
Pembahasan dan Diskusi

Jika dilihat dari perspektif historis pembangunan nuklir Iran, maka akan dijumpai bahwa pembangunan tersebut tidak terlepas dari campur tangan Amerika Serikat yang mendukung penuh dalam pengembangan program nuklir tersebut. Bukan hanya mendukung secara tenaga ahli yang dikirim ke Iran sebagai langkah pengembangan sumber daya manusia atau keahlian tim teknisi nuklir Iran, namun juga didukung secara finansial yang jumlahnya sangat fantastis.

Status nuklir Iran masih diklasifikasikan dalam daftar negara pengguna nuklir sebagai sumber daya energi seperti yang digambarkan

oleh Muhammed Haddad dan Ben Piven dalam media Aljazeera di bawah ini:

Gambar 1. World Nuclear Club



Dari gambar di atas terlihat ada 14 negara yang memiliki senjata nuklir, diantaranya AS yang memiliki sekitar 8500 kepala nuklir dan Israel memiliki 200 kepala nuklir, sekitar 30 negara dalam status pemanfaatan nuklir untuk energi, termasuk Iran, serta 18 negara lainnya sedang membangun reaktor nuklir (Aljazeera, 2012). Posisi Iran sebagai negara yang memiliki nuklir untuk kepentingan energi bisa saja berubah menjadi pembangunan nuklir untuk kepentingan militer. Hal ini disebabkan oleh teknologi nuklir yang sama antara nuklir yang digunakan untuk energi dan militer. Perbedaan diantara keduanya hanya berada pada posisi pengayaan uranium yang dilakukan, di mana nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer pengayaan uranium

yang dilakukan lebih besar skalanya dibanding untuk kepentingan energi.

Dalam pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), status pengembangan nuklir Iran dalam status diperbolehkan karena dianggap berada pada level aman yakni dalam kepentingan energi sehingga PBB tidak pernah mempermasalahkan pengembangan nuklir Iran. Dinamika hubungan Amerika Serikat terhadap Iran antara hubungan baik dan permusuhan menjadi penentu status situs nuklir yang dikembangkan Iran sejak lama. Ketika hubungan AS dan Iran baik, maka status nuklir tidak pernah dipermasalahkan oleh AS. Namun sebaliknya ketika hubungan antara AS dan Iran renggang dan cenderung bermusuhan, situs nuklir yang dikembangkan Iran selalu dipermasalahkan oleh AS dengan alasan keamanan internasional. Bagi AS dan Israel, hubungan yang tidak harmonis terhadap Iran sangat mengkhawatirkan apabila Iran mengembangkan nuklir secara berlebihan sehingga potensi untuk mengembangkan senjata nuklir terbuka lebar (Barzashka and Oelrich, 2012: 2).

Diplomasi yang dilakukan oleh Iran kepada pihak internasional, dalam hal ini Badan Tenaga Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency (IAEA)* sebagai organisasi yang memantau nuklir dunia terus dilakukan, bahkan Iran meminta pihak IAEA untuk menginspeksi situs nuklir yang dimilikinya. Hasil yang dikeluarkan oleh IAEA terhadap status nuklir Iran berada pada status

pengembangan nuklir pada level kepentingan energi, bukan kepentingan senjata. Namun, AS tidak mau menerima keputusan inspeksi IAEA dan mendesak untuk menghentikan program pengembangan nuklir dan memberikan sanksi kepada Iran (Akbar dan Kodimerinda, 2012: 18). Usulan ini ditolak oleh IAEA karena banyak pertimbangan, selain tidak terbukti dalam upaya pengembangan senjata nuklir, Iran juga dikhawatirkan akan keluar dari perjanjian *Non-Proliferation Treaty (NPT)* jika diberikan sanksi tersebut.

Bagi Amerika Serikat dan Israel, Iran menjadi sebuah negara yang mengancam dominasi mereka di Timur Tengah. Bagi AS, sejarah hubungan permusuhan dengan Iran menjadi dasar kekhawatiran AS terhadap Iran apabila berhasil memiliki senjata nuklir. Bagi Israel, kebangkitan nuklir Iran apabila memiliki senjata nuklir akan menjadi pesaing dan dominasi Israel di wilayah Timur Tengah. Maka untuk menghindari adanya pesaing kekuatan regional, maka Israel menuntut AS untuk bersikap agresif kepada pengembangan nuklir Iran. Hal ini karena dapat membahayakan posisi Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki 200 lebih nuklir.

Iran dan Israel memandang satu sama lain sebagai persaingan langsung di kawasan. Iran melihat Israel sebagai negara yang bertekad merusak sistem revolusioner Iran. Begitu juga Israel memandang Iran sebagai negara yang menjadi tantangan yang serius bagi strategis dan ideologi negara Yahudi (Kaye et.al, 2011: 3). Bagi Israel pengaruh Iran

yang meningkat sangat mengkhawatirkan bahwa itu akan mencapai perbatasan Israel di Lebanon dan Gaza melalui dukunga politik dan militernya terhadap Hizbullah dan Hamas. Begitu juga kekhawatiran Israel terhadap perkembangan nuklir Iran yang akan menurunkan tingkat kekuatan manuver israel.

Banyak sikap dan kebijakan Iran yang menjadi perhatian dan kekhawatiran bagi Israel. Misalnya sikap Iran terhadap Anti Zionis Israel adalah sebuah komitmen sejak revolusi Islam Iran hingga saat ini. Iran tidak akan pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Kemudian, Ahmadinejad juga mengatakan sikap bencinya kepada Israel dalam berbagai kesempatan dengan kata *“Israel should be wiped off the map”* dan *“we shall crush the U.S”* (Rubin, 2006: 23). Oleh karenanya, Iran selalu memandang negatif terhadap negara-negara kawasan yang menjalin hubungan baik dengan Israel. Kemudian, Iran merupakan negara yang paling mendukung Organisasi Islam yang berusaha melawan Israel. Sikap ini ditunjukkan Iran dengan jalan memberikan pelatihan, tempat, bahkan peralatan militer terhadap organisasi yang dianggap AS dan Israel sebagai teroris. Misalnya, di Lebanon, pemerintah Iran menjadi negara pendukung terhadap gerakan Hizbullah dan Hamas yang ada di Palestina (Gambill & Abdelnour, 2002: 2).

Atas dasar ketakutan inilah AS sengaja menekan Iran untuk menghentikan aktifitas pengembangan nuklirnya karena

dikhawatirkan akan menjadi senjata untuk melawan AS dan Israel. Bagi AS, keamanan sekutunya Israel menjadi kebijakan prioritas yang akan selalu dijaga. Hal ini karena Israel selain sekutu paling dekat AS, juga posisi Israel di Timur Tengah menjadi penting untuk memastikan kepentingan AS bisa terjaga di wilayah tersebut. Maka, berbagai cara harus dilakukan oleh AS untuk menghentikan pengembangan nuklirnya.

Pertama, Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran, hingga tahun 2018, Presiden terpilih AS, Donald Trump masih memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Iran meliputi sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, perdagangan, sektor migas dan bank sentral. Akibat sanksi ini, nilai mata uang Iran jatuh lebih dari 100% yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga barang domestik Iran secara signifikan (Pujayanti, 2009: 9). Ini dilakukan seiring keluarnya AS dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* pada tanggal 08 Mei 2018. JCPOA adalah kesepakatan yang dijalin oleh 5 negara tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina) beserta Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman. Kesepakatan ini ditandatangani di Wina pada tahun 2015, artinya perjanjian ini hanya bertahan selama 3 tahun. Di sisi lain, IAEA selalu membuat penilaian dan dilaporkan bahwa Iran sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diinginkan IAEA dalam masalah pengembangan

nuklirnya. Namun, AS tetap tidak mau menerima laporan IAEA dan tetap akan memberikan sanksi kepada Iran. Dari beberapa deretan fenomena perilaku kebijakan AS terhadap Iran, terlihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh AS terhadap Iran bergantung dengan situasi politik AS di Timur Tengah. Buktinya, perjanjian JCPOA yang berjalan sejak tahun 2015 terhenti pada tahun 2018 yang notabene sejalan dengan dukungan Iran terhadap Suriah yang mana bertentangan dengan kebijakan AS di sana.

Kedua, AS menggunakan jalan diplomasi kepada negara lain untuk ikut memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran terutama negara Eropa sebagai sekutu AS. AS memberikan ancaman dan memblokir pasar AS terhadap perusahaan Eropa apabila Eropa tidak ikut memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran. Kebijakan AS ini juga menjadi sebab negara Eropa ikut memberikan sanksi ekonomi dan boikot terhadap ekonomi Iran. Padahal Eropa menjadi salah satu negara mitra tujuan ekspor Iran. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Cina dan Rusia, bagi mereka sikap AS dipandang sebagai sikap yang justru menjadikan kawasan Timur Tengah, terutama dengan Iran semakin memburuk.

Ketiga, AS menggunakan organisasi internasional PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran. AS merupakan negara yang sangat penting di PBB. Salah satu penyumbang dana di PBB yang besar adalah AS, sehingga secara politis AS memiliki posisi strategis untuk

mengontrol resolusi dan kebijakan di PBB. Terakhir, AS pernah memangkas bantuan kepada PBB untuk tahun anggaran 2018-2019 sebesar US\$ 285 Juta (sekitar Rp 3,8 Triliun) dikarenakan resolusi PBB yang dianggap merugikan kepentingan politik AS di Timur Tengah (CNN Indonesia, 2017). Kekuatan ini digunakan oleh AS untuk memaksa PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran. Makanya beberapa resolusi yang berkaitan dengan sanksi terhadap Iran dikeluarkan oleh PBB.

Menurut RAND (2018:78), sebuah lembaga *Think Tank* terkemuka di Amerika Serikat, merilis beberapa prioritas kepentingan nasional AS sampai pada tahun 2025, yakni:

1. Mempertahankan Israel dan penyelesaian proses perdamaian di Timur Tengah
2. Terbukanya akses minyak
3. mencegah munculnya kekuatan lain (hegemon)
4. mencegah penyebaran senjata pembunuh massal
5. meningkatkan reformasi ekonomi dan politik melalui stabilitas politik
6. mengontrol gerakan terorisme

Kebijakan ini akan tetap menjadi panduan AS untuk menentukan sikap di wilayah Timur Tengah terutama terhadap Iran yang notabene tidak akan pernah diizinkan untuk menjadi pesaing hegemoni Israel sebagai sekutunya. Maka, apapun organisasi dunia

yang telah merekomendasikan bahwa Iran tidak mengembangkan nuklir, bagi AS sikap memberikan sanksi kepada Iran tetap akan dilakukan. Hal ini bergerak dari sikap Iran secara politis selalu bertentangan dengan sikap AS di kawasan Timur Tengah.

Kesimpulan

Kaum Realis tidak akan pernah menerima persepsi bahwa hukum yang disandarkan kepada organisasi internasional dalam mengatur negara-negara mampu membuat dunia internasional menjadi tertib dan damai. Kaum Realis lebih percaya kepada aspek kekuatan sendiri di mana negara akan terselamatkan dan *survive* ketika negara selalu menguatkan dirinya secara militer. Maka, kaum Realis selalu merekomendasikan kepada negara untuk senantiasa meningkatkan militer negaranya.

Kasus Iran yang berlarut hingga saat ini tidak akan mungkin mampu diselesaikan kecuali dengan menyamakan persepsi politik dan kebijakan AS. Terbukti ketika secara analisis data yang dilaporkan oleh Badan Atom dan Energi Internasional (IAEA) memaparkan tidak adanya bukti Iran mengembangkan nuklir ditolak oleh AS. Artinya, AS akan selalu menolak apapun informasi yang benar dari aktifitas nuklir Iran dikarenakan persepsi dan kebijakan politik Iran yang tidak searah dengan AS.

Daftar Pustaka

- Adirini Pujayanti, 2009, Sengketa Nuklir Iran – Amerika Serikat, Artikel Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XI, No. 10/II/Puslit/Mei/2019.
- Aleksius Jemadu, 2008, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Buzan, Barry, 1987, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, (London: Mcmillan Press Ltd).
- C. Gambill, Gary & Ziad K. Abdelnour, 2002, *Hezbollah: Between Tehran and Damascus*, *Middle East Intelligence Bulletin*, Vol. 4, No. 2.
- Dassa Kaye, Dalia et.al, 2011, *Isarel and Iran: A Dangerous Rivalry*, National Defense Research Institute, RAND Corporation.
- Etzioni, Amitai, 2010, *Can A Nuclear-Armed Iran be Deterred?*, *Military Review*.
- Floyd, Rita dan Stuart Croft, 2010, *European non-traditional Security Theory*, EU-GRASP Working Papers, Seventh Framework Programme.
- Hikmatul Akbar & Pinilih Kodimerinda, 2012, *Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomsinya kepada IAEA*, Vol. 16, No. 1.
- Ivanka Barzashka, Ivanka & Ivan Oelrich, 2012, *Iran and Nuclear Ambiguity*, *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 25, No. 1.
- Kiki Mikail, 2018, *Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah*, *Jurnal ICMES* Vol. 2, No.1.
- Lipmann, Walter, dalam John Baylis dan Steve Smith, 2001, *The Globalization of World Politics: A Introduction in World Politics*, (New York: Oxford University Press Inc.).
- Mansour, Imad, 2008, *Iran and Instability in the Middle East: How Preferences Influence the Regional Order*, *International journal*, Vol. 63, No. 4, Canadian International Council.
- Sinaga, Obsatar, 2009, Kepemilikan Nuklir dan Keamanan Nasional Iran: Suatu Studi Kasus, dalam *Sosiohumaniora (Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 11, No. 1.
- Poneman, Daniel, 1982, *Nuclear Power in The Developing World*, London: George Allen & Unwin.
- Rubin, Uzi, 2006, *The Global Reach of Iran's Ballistic Missiles*, Memorandum 86, Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv University.

Website

- Bahgat, Gawdat, 2007, *Iran and the United States: The Emerging Security Paradigm in the Middle East*, diakses dari

- <<http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/Articles/07summer/bahgat.pdf>>
- CNN Indonesia, diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171226140859-134-264828/amerika-serikat-pangkas-bantuan-untuk-anggaran-pbb>>.
- Haddad, Mohammed and Ben Piven, 2012, *Interactive: World Nuclear Club*, diakses dari <<http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/05/201252416836407993.html>>
- Idjang Tjarsono, *Strategi Keamanan dalam Paradigma Realis*, diakses dari <<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6240/32.%20IDJANG%20-%20STRATEGI%20KEAMANAN%20DALAM%20PARADIGMA%20REALIS.pdf?sequence=1>>
- Muhammad Iqbal, *Review Mata Kuliah Diplomasi Modern yang ditulis oleh I Gede Wisura*, diakses dari <<http://id.scribd.com/doc/82513744/Review-DipMod-Coercive-Diplomacy>> pada tanggal 11 November 2012 pukul 20.37 WIB.
- Sahimi, Mohammad, 2003, *Iran nuclear program Part I: it's History*, diakses dari <<http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html>>.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Biografi

Rio Sundari merupakan dosen tetap di jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Riau. Minat penelitiannya adalah tentang pandangan islam dalam Hubungan Internasional dan kajian timur tengah